



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

SUBSIDI TRANSPORTASI DAN ENERGI

Niken Paramita Purwanto

Analisis Legislatif Ahli Muda

niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah sangat gencar memberikan berbagai subsidi, seperti pemberian subsidi untuk kendaraan listrik dan termasuk rencana subsidi BBM Pertamina untuk menggantikan Peralite. Terkait dengan subsidi untuk kendaraan listrik, pada 30 Agustus lalu pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi motor listrik untuk mendorong pembelian motor listrik, di mana perluasannya mencakup warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk menerima subsidi senilai Rp7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik atau satu KTP berhak mendapatkan subsidi untuk pembelian satu unit motor listrik. Sebelumnya, syarat penerima subsidi motor listrik terbatas hanya untuk kalangan UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi motor listrik karena penjualan motor listrik masih lesu dan tampak kurang peminat. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 triliun selama tahun 2023-2024 untuk subsidi motor listrik. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), sejak Maret 2023 di mana aturan subsidi pembelian motor listrik diberlakukan sampai dengan 30 Agustus 2023, baru terdapat 2.430 unit penjualan motor listrik bersubsidi dengan hanya 225 unit motor listrik yang sudah tersalurkan ke konsumen. Jauh dari target sebanyak 200.000 unit motor listrik sampai akhir 2023.

Selain subsidi untuk motor listrik, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan subsidi untuk Pertamina. Rencana ini diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI. Pertamina menargetkan produk Pertamina Green 92 menggantikan Peralite di 2024 dan tetap dikategorikan sebagai produk BBM bersubsidi. Data dari Pertamina menunjukkan bahwa pada tahun 2022 lalu, realisasi volume penggunaan Jenis BBM Umum (JBU) mencapai 24,46 juta kiloliter (kl), dengan Pertamina termasuk dalam kategori ini. Sementara realisasi volume penggunaan Peralite mencapai 29,5 juta kl.

Rencana penggantian Peralite dengan Pertamina Green 92 merupakan langkah lanjutan dari Program Langit Biru tahap II dan telah melalui evaluasi internal Pertamina. Namun, belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk menjadikan Pertamina Green 92 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan Peralite karena masih perlu pembahasan lebih lanjut. Jika keputusannya menjadikan Pertamina Green 92 sebagai JBKP menggantikan Peralite maka harganya tidak ditentukan oleh pasar karena akan diatur oleh pemerintah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan mengenai rencana ini nantinya adalah kebijakan yang tepat dalam skema subsidi dan kompensasi kepada masyarakat. Masyarakat tentu diharapkan mendapat BBM dengan kualitas yang lebih baik sejalan dengan kontribusi pada upaya pengurangan emisi. Namun, dari sisi harga juga perlu menjadi perhatian agar tidak membebani masyarakat.

Atensi DPR

Pemerintah sangat gencar memberikan berbagai subsidi, seperti pemberian subsidi untuk kendaraan listrik dan termasuk rencana subsidi BBM Pertamina untuk menggantikan Peralite. Terkait dengan subsidi motor listrik, pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi motor listrik karena penjualan motor listrik masih lesu. Sampai dengan 30 Agustus 2023, baru terdapat 2.430 unit penjualan motor listrik bersubsidi dari target sebanyak 200.000 unit motor listrik sampai akhir 2023. Sementara terkait dengan subsidi energi, Pertamina menargetkan produk Pertamina Green 92 dapat menggantikan Peralite di 2024 sebagai langkah lanjutan dari Program Langit Biru tahap II, namun belum ada keputusan resmi dari pemerintah karena perlu pembahasan lebih lanjut.

Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri perlu memberi perhatian terhadap hal ini. Komisi VII DPR RI melalui fungsi anggaran dan pengawasan perlu memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan mengawasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam skema subsidi untuk transportasi dan energi agar tepat sasaran.

Sumber

bbc.com, 31 Agustus 2023; dan
Kontan, 31 Agustus 2023.

Minggu ke-5 Agustus
(28 Agustus s.d. 3 September 2023)

2023



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023